

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Bahwa Gubernur Anies Baswedan resmi mencabut semua izin di 13 pulau reklamasi teluk Jakarta dalam permasalahan ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak bertentangan dengan Asas-asas Peraturan Perundangan-undangan telah mengikuti prosedur melalui Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja badan Koordinasi pengelolaan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 338 Tahun 1960 tentang Pembentukan Panitia Perencana Pembangunan Ancol serta penunjukan anggota-anggotanya. Gubernur kepala Daerah Jakarta Raya yang ditetapkan sebagai penanggung jawab atas kelancaran pelaksana pembangunan Ancol, dalam rangka pelaksana Keputusan Presiden (keppres) tersebut.
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap investor akibat adanya pencabutan izin teluk reklamasi oleh Pemerintah Daerah tidak adanya kepastian terhadap pengembang sehingga menimbulkan kerugian para pengembang secara materil yang telah menanamkan modal. Pemerintah berhak menganti kerugian kepada perusahaan yang ditimbulkan akibat pencabutan izin teluk reklamasi pantai Jakarta dan pengembang berhak untuk melakukan gugatan kepada pemerintah daerah DKI Jakarta. Sehingga kebijakan reklamasi pantai yang dilakukan memaksimalkan

kesejahteraan individu (investor) akan tetapi meminimalkan kesejahteraan umum (masyarakat yang berada disekitar wilayah reklamasi pantai terutama nelayan).

## **B. Saran**

1. Pemerintah pusat dalam hal ini perlu mengawasi dan juga memberikan penilaian terhadap kajian-kajian untuk persyaratan pembangunan reklamasi teluk Jakarta. Sehingga jika terdapat persyaratan yang belum dilengkapi oleh para pengembang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan moratorium guna mengevaluasi dan melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pengembang. Proses ini juga sangat menentukan apakah pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta ini memang layak dan dapat dijadikan solusi bagi permasalahan dan isu-isu yang ada di DKI Jakarta. Para pengembang yang terbukti melakukan tindak kecurangan dengan perizinan, perlu mendapatkan sanksi berupa pencabutan izin pembangunan dan pengelolaan bangunan serta oknum yang bersangkutan wajib diadili sesuai hukum yang berlaku. Hal ini diperlukan agar para pengembang mentaati semua peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Masyarakat perlu lebih kritis dan peka terhadap pembangunan reklamasi teluk jakarta ini, bahkan pembangunan reklamasi teluk jakarta ini perlu dikaji dengan melakukan seminar dan diskusi publik oleh masyarakat. Karena Reklamasi Teluk Jakarta merupakan salah satu pembangunan yang menjadi patokan bagi daerah lain untuk melakukan pengembangan dan pembangunan di daerahnya guna pemerataan ekonomi dan kemajuan daerah tersebut.